

**DINAMIKA KEMISKINAN DAN PENGUKURAN KERENTANAN KEMISKINAN
DALAM UPAYA MELINDUNGI ANAK-ANAK DARI DAMPAK KEMISKINAN
(Studi Kasus pada Rumah Tangga di Pulau Jawa Tahun 2008-2010)**

Armelia Zukma Kumala, S. S. T.

Haerani Natali Agustini, Ph. D.

Rais, S. S. T.

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah menyita banyak pemikiran para ahli, waktu, dan anggaran negara dalam upaya pengentasannya. Dampak terbesar yang ditimbulkan oleh fenomena kemiskinan ini adalah munculnya kemiskinan anak. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak mendapat hak-hak yang semestinya mereka peroleh. Berbicara mengenai kemiskinan anak tentu tidak akan pernah terlepas dari kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang miskin secara otomatis akan memiskinkan anak yang ada pada rumah tangga tersebut. Sehingga untuk mencegah terjadinya kemiskinan pada anak, maka sama halnya dengan mengupayakan pengentasan kemiskinan rumah tangga tersebut. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, sebenarnya kita luput melihat fenomena lebih banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan, khususnya rumah tangga yang hampir miskin. Rumahtangga-rumahtangga tersebut sangat rentan untuk terperosok dalam jurang kemiskinan. Sehingga hal paling mendasar yang perlu dilakukan untuk melakukan pengentasan kemiskinan adalah mencegah rumahtangga untuk jatuh miskin. Pengukuran kerentanan kemiskinan dalam penelitian ini diadopsi dari pendekatan yang dibangun oleh Chaudhuri yaitu *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP). Yang membedakan adalah penggunaan data panel dalam penelitian ini, sehingga model pengeluaran konsumsi yang dibangun adalah model regresi data panel.

Kata kunci : kerentanan, anak, miskin, panel

I. Latar Belakang Penelitian

Keberadaan penduduk miskin dalam suatu wilayah tidak akan membawa kemakmuran bagi wilayah tersebut sehingga wajib diberantas. Gagasan ini tersirat dalam ungkapan Smith (1776) dalam Todaro (2004) yang menyatakan bahwa “Tidak ada masyarakat yang makmur dan bahagia, jika sebagian besar penduduknya berada dalam kemiskinan dan kesengsaraan” (hal.219). Oleh karena itu, pemberantasan kemiskinan telah



menjadi tantangan utama pembangunan dewasa ini, karena hakikat pembangunan ekonomi bukan terletak pada pendapatan yang dihasilkan suatu wilayah, tetapi pada peningkatan kualitas kehidupan penduduk.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mudah dilihat bahkan dirasakan, tetapi cukup sulit untuk didefinisikan. Manusia dapat merasakan adanya kemiskinan dari apa yang dialaminya atau dialami tetangganya, atau lebih luas lagi, dialami oleh bangsanya. Secara formal, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai kondisi kekurangan serta ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kehidupan manusia yang selayaknya dapat dimiliki. Ketidakmampuan ini umumnya tidak hanya tergambar secara materi tetapi juga secara psikologis dapat menimbulkan perasaan rendah diri pada individu yang mengalaminya. Gejala serta dampak-dampak kemiskinan yang tergambar tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan telah berdampak luas di berbagai aspek kehidupan hingga ke tata pemerintahan.

Menariknya, fenomena kemiskinan ternyata tidak hanya memberikan dampak negatif bagi orang dewasa saja, tetapi juga pada anak-anak. Dampak yang ditimbulkan pada anak justru jauh lebih berbahaya dan beresiko daripada yang timbul pada orang dewasa karena dampak kemiskinan pada anak bersifat kerusakan jangka panjang. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan dan masa kecil yang bahagia, berkualitas dan yang layak didapatkan oleh anak-anak menjadi terampas karena kondisi ekonomi keluarga. Kemiskinan yang membelit keluarga membuat peran anak-anak dalam keluargapun bergeser, karena mereka menjadi ikut berperan dalam memenuhi nafkah keluarga. Fenomena anak-anak usia dini yang bekerja di Indonesia juga berpengaruh pada jumlah anak-anak yang putus sekolah. Hal ini dikarenakan sebagian besar dari keluarga miskin tidak mampu membiayai anak-anak mereka untuk sekolah, sehingga mereka terpaksa putus sekolah untuk bekerja dan dengan berbagai alasan. Fakta tersebut sangat memprihatinkan, mengingat merekalah adalah penerus bangsa ini nantinya dan merupakan aset berharga yang perlu dijaga baik-baik kelangsungan hidupnya. Anak-anak hanyalah korban tak bersalah dari ganasnya virus kemiskinan yang terus menyerang rumah tangga.

Berbicara mengenai kemiskinan anak tentu tidak akan pernah terlepas dari kemiskinan rumah tangga. Rumah tangga yang miskin secara otomatis akan memiskinkan anak yang ada pada rumah tangga tersebut. Sehingga untuk mencegah terjadinya kemiskinan pada anak, maka sama halnya dengan mengupayakan pengentasan kemiskinan rumah tangga tersebut. Isu mengenai pengentasan kemiskinan mulai semakin gencar dibicarakan dan diupayakan sekitar dua dasawarsa ini. Sebagai negara berkembang, tujuan *Millenium*



Development Goals (MDGs) untuk menurunkan kemiskinan juga menjadi tanggung jawab dan pekerjaan rumah bagi Indonesia. Dalam perjalanannya, Indonesia pun secara khusus menargetkan menurunkan tingkat kemiskinan absolut dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 8-10 persen pada akhir 2014 yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah dan persentase penduduk miskin Indonesia pada tahun 2010 adalah 31,02 juta atau sekitar 13,33 persen. Perubahan persentase penduduk miskin dari 14,15 persen pada tahun 2009 menjadi 13,33 persen pada tahun 2010 bukanlah sebuah perubahan satu arah. Di dalamnya penuh dengan pergerakan kemiskinan penduduk. Penduduk yang miskin pada tahun tertentu belum tentu tetap miskin pada tahun berikutnya. Begitupun sebaliknya. Adanya guncangan (*shock*) dalam perekonomian, pekerjaan kepala rumah tangga, ataupun kondisi merugikan lain, dapat mengakibatkan penduduk menjadi miskin pada periode tertentu. Dengan demikian, jelas terlihat adanya unsur ketidakpastian serta kemungkinan perubahan status miskin dalam kehidupan penduduk.

Pada hakikatnya, setiap penduduk ataupun rumah tangga memiliki peluang yang berbeda untuk menjadi miskin pada suatu waktu tertentu. Hal ini menunjukkan aspek dinamis dari kemiskinan dan sejalan dengan Chaudhuri (2003) yang menyatakan bahwa kemiskinan merupakan sebuah fenomena stokastik dan tingkat kemiskinan rumah tangga saat ini belum tentu menjadi sebuah panduan yang baik mengenai kemiskinan rumah tangga pada masa mendatang. Fenomena stokastik dalam kemiskinan mengandung arti bahwa setiap penduduk ataupun rumah tangga memiliki kemungkinan atau peluang menjadi miskin, sehingga rumah tangga yang miskin pada saat ini dapat berasal dari rumah tangga yang miskin atau dapat juga berasal dari rumah tangga tidak miskin pada periode sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, kemiskinan benar-benar merupakan masalah multidimensi yang memerlukan kebijakan dan program intervensi multidimensi dengan tujuan membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penurunan kemiskinan yang tepat dan strategis. Namun, sebelum penyusunan suatu strategi, diperlukan kajian yang mendalam tentang kemiskinan agar nantinya dihasilkan strategi yang efektif dan tepat sasaran. Untuk itu, diperlukan suatu pengukuran kerentanan kemiskinan. Pengukuran kerentanan kemiskinan tidak sama dengan pengukuran kemiskinan. Dercon (2002), memaparkan bahwa dalam konteks strategi risiko, pengukuran kerentanan kemiskinan merupakan pengukuran *ex ante*, yaitu pengukuran terhadap sesuatu yang belum terjadi, sehingga strategi yang disusun diharapkan dapat mencegah terjadinya kemiskinan. Sementara



itu, pengukuran kemiskinan merupakan pengukuran *ex post*, yaitu pengukuran terhadap sesuatu yang telah terjadi, sehingga strategi yang disusun hanya bertujuan untuk mengurangi dampak kemiskinan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Chaudhuri (2003) menekankan dibutuhkannya pengukuran kerentanan kemiskinan tidak hanya karena kerentanan adalah sebuah dimensi yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan, tetapi juga karena pengukuran ini memiliki fungsi penting, yaitu menginformasikan rancangan strategi ke depan (*forward-looking*) penanggulangan kemiskinan. Fungsi kedua adalah menyoroti perbedaan antara pencegahan kemiskinan dan intervensi pengentasan kemiskinan serta fungsi ketiga yaitu menjelaskan adanya risiko dalam dinamika kemiskinan.

Dengan demikian, analisis dinamika kemiskinan serta pengukuran kerentanan kemiskinan perlu dilakukan. Melalui penelitian ini, tujuan umum yang ingin dicapai adalah mengkaji gambaran dinamika kemiskinan serta kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk melindungi anak-anak dari bahaya kemiskinan. Hal ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mencapai tujuan akhir yaitu memutus rantai kemiskinan.

Dalam upaya memfokuskan arah penelitian, maka studi kasus dilakukan di Pulau Jawa. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS. Karakteristik penduduk dan anak-anak secara individu maupun rumah tangga merupakan data panel yang diperoleh dari Susenas tahun 2008 hingga 2010. Sementara itu, karakteristik lingkungan/wilayah tempat tinggal dengan objek penelitian desa diperoleh dari BPS melalui Pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2008. Data-data tersebut kemudian di-*match*-kan dengan data panel rumah tangga.

II. Tinjauan Literatur

Kemiskinan dan kerentanan kemiskinan merupakan dua hal yang berbeda, namun saling terkait. Keterkaitan antara keduanya tidak bisa dilepaskan pula dengan adanya dinamika kemiskinan. Hal ini disebabkan kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dinamis. Seseorang dapat masuk ke dalam kemiskinan dan keluar dari kemiskinan sepanjang waktu karena berbagai sebab. Oleh karena itu, pada setiap titik waktu seseorang memiliki peluang untuk jatuh miskin.

Baulch dan Hoddinot (2000) dalam Christiaensen dan Boisvert (2000) mengemukakan bahwa seseorang bisa masuk dan keluar dari kemiskinan. Akibatnya, jika perhatian hanya difokuskan pada kemiskinan saat ini, akan menghilangkan poin penting, yaitu orang yang tidak miskin hari ini, mungkin akan miskin keesokan hari. Dalam kaitannya



dengan pengukuran kemiskinan, kerentanan diidentifikasi sebagai dimensi yang sangat penting dari kemiskinan (Kanbur dan Squire, 1999 dalam Christiaensen dan Boisvert, 2000).

World Bank Institute (2002) mendefinisikan kerentanan sebagai peluang atau risiko menjadi miskin atau jatuh menjadi lebih miskin pada waktu-waktu mendatang. Konsep kerentanan ini adalah *forward looking* dan secara implisit memperhitungkan ketidakpastian kejadian masa depan. Kerentanan bermakna tingginya peluang saat ini untuk mengalami kekurangan di masa depan, sementara kemiskinan bermakna kekurangan di masa kini (Baulch dan Hoddinot, 2000 dalam Christiaensen dan Boisvert, 2000).

Berkenaan dengan ketidakpastian, setiap harinya seseorang memiliki risiko untuk mengalami kejadian-kejadian yang merugikan atau tidak diinginkan. Chaudhuri, Jalan, dan Suryahadi (2002) mendefinisikan kerentanan sebagai risiko *ex ante* yang akan dihadapi rumah tangga, jika saat ini tidak miskin, akan jatuh ke bawah Garis Kemiskinan (GK), atau jika saat ini miskin, akan tetap terperangkap dalam kemiskinan. Risiko juga dapat dihubungkan dengan *shock*, karena sepanjang waktu, sebuah rumah tangga mungkin mengalami guncangan (*shock*), baik yang berasal dari rumah tangga itu sendiri, lingkungan, maupun kondisi perekonomian makro. Berkenaan dengan *shock* tersebut, kerentanan juga dapat didefinisikan sebagai pengaruh *shock-shock* merugikan terhadap kesejahteraan (Cunningham dan Maloney, 2000 dalam Chaudhuri, Jalan, Suryahadi, 2002). Risiko atas kejadian-kejadian merugikan (*shock*) dapat mengancam masing-masing orang ataupun masyarakat secara luas, sebagaimana pernyataan Ravallion (1988) bahwa risiko yang dihadapi individu atau rumah tangga dapat bersifat *independent* antara satu dengan yang lain. Namun, ada pula situasi ketika nilai risiko dari suatu variabel dihadapi oleh semua rumah tangga (*shared risks*).

Sebagai salah seorang peneliti yang membangun pendekatan pengukuran kerentanan, Chaudhuri bekerja sama dengan Jalan dan Suryahadi melakukan pengukuran kerentanan kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan data *cross section*. Data tersebut berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Mini-Susenas) Desember 1998 dan Agustus 1999. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah menunjukkan bahwa meskipun data *cross section* memiliki keterbatasan dalam mengukur kerentanan, tetapi analisis yang mendalam mengenai data *cross section* dapat memberikan informasi mengenai masa depan.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan pendekatan *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP) yang dibangun oleh Chaudhuri. GK yang digunakan adalah GK Februari 1999 kemudian dideflasi menjadi Desember 1998 dan Agustus 1999 dengan IHK tertimbang provinsi. Pada dasarnya kerangka kerja yang dilakukan cukup sederhana. Intinya, jika



prediksi peluang untuk jatuh miskin dari rumah tangga yang memiliki karakteristik-karakteristik tertentu dapat dihitung, maka estimasi kerentanan rumah tangga dapat dihasilkan. Ketepatan estimasi kerentanan yang dibangun oleh Chaudhuri, Jalan, dan Suryahadi cukup baik. Mereka menggunakan data mini-Susenas Desember 1998 untuk membangun model dan menggunakan data survei Agustus 1999 untuk memvalidasi hasil estimasi kerentanan.¹ Hasilnya mengindikasikan bahwa metode yang dibangun untuk memprediksi kemiskinan rumah tangga di masa depan cukup akurat pada berbagai sub-populasi data.

Berdasarkan beberapa metode pengukuran yang telah dibangun oleh para peneliti sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan diterapkan konsep pengukuran yang dibangun oleh Chaudhuri yaitu *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP). Namun, penerapannya akan dikembangkan dengan menggunakan data panel.

Kemiskinan Anak

Anak yang lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga miskin kronis, memiliki kemungkinan 35 persen lebih tinggi untuk tetap miskin saat dewasa dibandingkan anak yang lahir dan dibesarkan dalam rumah tangga yang tidak miskin kronis (Pakpahan et al. 2009). Kemiskinan kronis menyebabkan individu dan keluarga terperangkap dalam lingkaran kemiskinan, sehingga investasi sumberdaya manusia yang dilakukan kurang. Kemiskinan tersebut akhirnya diturunkan kepada generasi selanjutnya karena rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang dihasilkan dalam keluarga pada generasi berikutnya (CPRC 2008). Anak-anak merupakan kelompok umur yang paling parah didera oleh kemiskinan dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Kemiskinan yang menimpa anak-anak akan menyebabkan kerusakan jangka panjang, baik terhadap perkembangan mental maupun fisiknya. Hal ini pada gilirannya akan terus berlanjut pada generasi selanjutnya ketika mereka menjadi orang dewasa yang tetap terjebak dalam mata rantai kemiskinan dan tidak mampu memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Kemiskinan pun akan terus berlanjut seakan tanpa batas bagi mereka. Lebih jauh, kemiskinan bagi anak-anak akan membawa sejumlah konsekuensi negatif, antara lain terhambatnya pertumbuhan fisik, perkembangan kognitif (antara lain kemampuan membaca), dan terganggunya fungsi sosio-emosional yang menyebabkan penyimpangan perilaku dan depresi. Anak-anak yang hidup dalam kemiskinan juga kemungkinan akan mengalami penyalahgunaan secara fisik oleh orang tuanya yang hidup dalam lingkungan yang penuh tekanan akibat kesengsaraan secara ekonomi. Insiden,

¹ Mini-Susenas tahun 1998 merupakan survei yang dilakukan kepada 10.000 rumah tangga. Pada tahun 1999, dilakukan survei mini-Susenas dengan mewawancarai kembali 75 persen dari 10.000 rumah tangga tersebut.



durasi, dan kekronisan kemiskinan pada anak-anak juga akan berdampak kepada perlambatan perkembangan IQ anak, prestasi pendidikan, dan rendahnya produktivitas ketika mereka dewasa sebagaimana terukur dengan rendahnya upah dan jam kerja mereka. Bahkan, mereka pun akan kehilangan akses untuk mendapatkan penghidupan yang layak yang pada gilirannya akan semakin menambah beban ketergantungan kepada orang lain. Implikasinya, dengan tingginya tingkat deprivasi ekonomi yang dialami anak-anak akan menyebabkan lestarnya kemiskinan ketika mereka dewasa nantinya.

Pertumbuhan fisik yang tidak maksimal, kondisi kesehatan yang rendah, pendidikan yang tidak terarah praktis membentuk anak-anak berkembang seadanya. Kerasnya perlakuan yang diterima anak-anak secara psikologis bisa mengajari anak untuk melakukan hal negatif mengingat sifat anak yang suka meniru apa yang dilihatnya.

III. Metodologi

Pengukuran kerentanan kemiskinan membutuhkan beberapa langkah pendahuluan yang melibatkan teknik inferensia statistik, yaitu permodelan pengeluaran konsumsi, kemudian menghitung peluang rumah tangga untuk jatuh miskin. Mengenai inferensia statistik, menurut Walpole (1993), inferensia statistik mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis sebagian data untuk menghasilkan suatu peramalan atau penarikan kesimpulan mengenai populasi.

Pondasi dasar yang digunakan untuk melakukan pengukuran kerentanan dalam penelitian ini diadopsi dari pendekatan yang dibangun oleh Chaudhuri yaitu *Vulnerability as Expected Poverty* (VEP). Pendefinisian kerentanan serta prosedur penghitungan peluang rumah tangga untuk jatuh miskin sama dengan VEP. Yang membedakan adalah penggunaan data panel dalam penelitian ini, sehingga model pengeluaran konsumsi yang dibangun adalah model regresi data panel.

Data panel atau longitudinal merupakan himpunan data yang menggabungkan observasi-observasi deret waktu dan *cross section*. Himpunan data panel dapat mengandung ribuan individu atau rumah tangga yang masing-masing diobservasi pada beberapa titik waktu. Kerangka dasar dari analisis data panel adalah model regresi sebagai berikut:

$$Y_{it} = X'_{it}\beta + Z'_i\alpha + \varepsilon_{it}$$

Terdapat k variabel bebas yang terobservasi dalam matrik X'_{it} . Variabel-variabel tersebut dapat berubah antar waktu (t) tetapi tidak berubah antar individu (i), berubah antar i tetapi tidak berubah antar t , ataupun berubah antar i dan t . Sementara itu, efek individual yang tidak

terobservasi (heterogenitas/komponen tak terobservasi/variabel laten) tergambar dalam $Z_i'\alpha$, dimana Z_i' mengandung nilai yang konstan dan himpunan variabel khusus individu atau kelompok, yang konstan sepanjang periode. ε_{it} disebut *error (idiosyncratic error)* yang bervariasi antar i dan t .

Selanjutnya, akan terdapat beberapa variasi dari model data panel, yaitu: *Pooled Regression (Common Effects Model)*, Model Efek Tetap (*Fixed Effects Model*), dan Model Efek Random (*Random Effects Model*)

Tahapan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan dan Spesifikasi Model Penelitian

Untuk menghasilkan suatu ukuran kerentanan kemiskinan, dilakukan tahapan yang secara terperinci dipaparkan dalam uraian berikut.

Membangun Model Pengeluaran Konsumsi

Model regresi merupakan salah satu metode analisis dependensi, artinya terdapat variabel (variabel tak bebas) yang dipengaruhi variabel lain (variabel bebas). Dalam penelitian ini, variabel tak bebas yang digunakan adalah pengeluaran konsumsi per kapita. Ke depannya pengeluaran konsumsi ini akan dijadikan dasar dalam pembentukan fungsi peluang, sehingga variabel pengeluaran konsumsi diharuskan mengikuti suatu distribusi tertentu misalnya distribusi normal. Namun, pengeluaran konsumsi antar individu atau antar rumah tangga nilainya akan sangat bervariasi dan tentunya akan sulit mengikuti distribusi normal. Oleh karena itu, dalam pendekatan VEP pengeluaran konsumsi diasumsikan berdistribusi lognormal sehingga dengan mentransformasi pengeluaran konsumsi dalam bentuk logaritma natural (Ln), maka Ln pengeluaran konsumsi diasumsikan berdistribusi normal.

Terdapat 15 variabel bebas yang digunakan membangun model. Di antara 15 variabel ini, terdapat variabel yang tidak bisa diperoleh langsung nilainya sehingga membutuhkan suatu simulasi untuk mendapatkan nilainya.

Variabel *shock* inflasi diperoleh melalui suatu simulasi yang sederhana. Untuk wilayah perkotaan, pertama-tama berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) bulanan menurut kota, dihitung inflasi *year on year*, yaitu inflasi bulanan terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya.

$$\text{Inflasi}_{\text{yoy2008}} = \frac{\text{IHK}_{\text{Maret2008}} - \text{IHK}_{\text{Maret2007}}}{\text{IHK}_{\text{Maret2007}}} \times 100\%$$

Dengan cara yang sama, didapatkan pula inflasi tahun 2009 dan 2010. Untuk wilayah perdesaan, inflasi *year on year* dihitung berdasarkan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) bulanan menurut provinsi dengan cara menggantikan IHK dengan IKRT pada formula di atas. Selanjutnya, suatu kota atau provinsi yang inflasi tahunannya melebihi



tingkat dan sasaran inflasi yang ditetapkan Menteri Keuangan, yaitu 5 persen untuk tahun 2008, 4,5 persen untuk tahun 2009, dan 4 persen untuk tahun 2010, dengan deviasi sebesar 1 persen, maka penduduk yang tinggal di kota (untuk model perkotaan) dan provinsi (untuk model perdesaan) tersebut dianggap mengalami *shock* inflasi.

Model regresi perkotaan dan perdesaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah

$$\ln\widehat{\text{Kons}}_{it} = f(\text{umur}, \text{pendidikan}, \dots, \text{jarak})$$

Atau jika dijabarkan, model tersebut menjadi:

$$\begin{aligned} \ln\widehat{\text{Kons}}_{it} = & \alpha + \beta_1 \text{umur}_{it} + \beta_2 \text{dik1}_{it} + \beta_3 \text{ukuran}_{it} + \beta_4 \text{prop_kerja} + \\ & \beta_5 \text{kredit1}_{it} + \beta_6 \text{lantai1}_{it} + \beta_7 \text{luas}_{it} + \beta_8 \text{listrik}_{it} + \\ & \beta_9 \text{air1}_{it} + \beta_{10} \text{kerja2}_{it} + \beta_{11} \text{inflasi2}_{it} + \beta_{12} \text{geo1}_{it} + \\ & \beta_{131} \text{lalin1}_{it} + \beta_{132} \text{lalin2}_{it} + \beta_{14} \text{info1}_{it} + \beta_{15} \text{jarak}_{it} \end{aligned}$$

di mana

α : intersep

β_j : koefisien regresi variabel ke-j, $j = 1, 2, \dots, 15$

$i = 1, 2, \dots, 13.999$ (perkotaan) dan $i = 1, 2, \dots, 14.138$ (perdesaan)

$t = 2008, 2009, 2010$

Berdasarkan model regresi di atas, dapat diketahui variabel-variabel yang memengaruhi pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga (walaupun pengeluaran konsumsi sudah dalam bentuk logaritma natural, tetapi nilai yang dihasilkan masih searah).

Mengestimasi Nilai Harapan, Varian Pengeluaran Konsumsi, serta Menentukan Garis Kemiskinan

Pendekatan VEP mensyaratkan estimasi nilai harapan dan varian pengeluaran konsumsi setelah model terbentuk. Nilai harapan menggambarkan prospek pengeluaran konsumsi pada masa mendatang atau dalam hal ini pada tahun depan. Nilai harapan dan varian diperoleh melalui formula:

$$E[\ln\text{Kons}_{it}] = \mathbf{X}'_{it} \boldsymbol{\beta}$$

$$V[\ln\text{Kons}_{it}] = E[\mathbf{v}_i \mathbf{v}'_i]$$

Akan dihasilkan sebanyak $N \times 3$ nilai harapan dan N varian pengeluaran konsumsi. Dengan demikian setiap rumah tangga memiliki tiga nilai harapan pengeluaran konsumsi.

Selanjutnya, peluang rumah tangga miskin dinyatakan melalui fungsi peluang berikut:

$$P[\text{Kons}_{i,t+1} < \text{GK}_{t+1}]$$



dengan menerapkan transformasi yang telah dilakukan serta asumsi mengenai distribusi normal, maka

$$\begin{aligned}
 \text{Kerentanan}_{it} &= P[\ln\text{Kons}_{i,t+1} < \ln\text{GK}_{t+1}] \\
 &= P\left[\frac{\ln\text{Kons}_{i,t+1} - E[\ln\text{Kons}_{it}]}{\sqrt{V[\ln\text{Kons}_{it}]}} < \frac{\ln\text{GK}_{t+1} - E[\ln\text{Kons}_{it}]}{\sqrt{V[\ln\text{Kons}_{it}]}}\right] \\
 &= P\left[z < \frac{\ln\text{GK}_{t+1} - E[\ln\text{Kons}_{it}]}{\sqrt{V[\ln\text{Kons}_{it}]}}\right] \\
 &= \Phi\left[\frac{\ln\text{GK}_{t+1} - E[\ln\text{Kons}_{it}]}{\sqrt{V[\ln\text{Kons}_{it}]}}\right]
 \end{aligned}$$

Peluang rumah tangga untuk jatuh miskin pada tahun depan, merupakan fungsi kepadatan kumulatif (*Cumulative Distribution Function/CDF*) dari distribusi normal baku.

Dari langkah penghitungan peluang di atas, untuk menghasilkan kerentanan pada tahun t dibutuhkan Garis Kemiskinan (GK) tahun $t+1$. Artinya, dalam penelitian ini dibutuhkan data GK Pulau Jawa untuk perkotaan dan perdesaan tahun 2009, 2010, dan 2011. Sebagaimana diketahui, GK yang dipublikasikan BPS adalah GK nasional, provinsi, dan kabupaten sehingga untuk mendapatkan GK Pulau Jawa (kota dan desa), dihitunglah rata-rata tertimbang dari GK provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa dengan penimbangannya adalah jumlah penduduk miskin di provinsi tersebut.

Menghitung Peluang Rumah Tangga untuk Jatuh Miskin pada Tahun Mendatang

Prosedur penghitungan peluang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya. Pada akhirnya akan diperoleh peluang masing-masing rumah tangga (sebanyak N) untuk periode tiga tahun. Dengan demikian, kerentanan rumah tangga ke- i pada tahun 2008 menyatakan peluang rumah tangga tersebut jatuh miskin pada tahun 2009, kerentanan rumah tangga ke- i pada tahun 2009 menyatakan peluang rumah tangga tersebut jatuh miskin pada tahun 2010, dan seterusnya.

Menghitung Kerentanan Kemiskinan

Apabila peluang setiap rumah tangga untuk jatuh miskin telah dihitung, selanjutnya rumah tangga-rumah tangga tersebut dikategorikan menjadi rentan miskin atau tidak. Untuk itu, dibutuhkan suatu titik potong (*cut off point*), atau bisa juga disebut *threshold*. Namun, tidak ada aturan khusus untuk menentukan *threshold* ini (*arbitrary*). Menurut Chaudhuri (2002), salah satu *threshold* yang dapat digunakan adalah *threshold* relatif, yaitu tingkat kemiskinan saat ini dalam populasi (fraksi kemiskinan). Dalam perspektif ini, batas (*threshold*) bersifat relatif dengan dasar pemikiran bahwa tingkat kemiskinan saat ini



mencerminkan rata-rata tingkat kerentanan dalam populasi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditetapkan *threshold* yaitu fraksi kemiskinan tahun 2008, 2009, dan 2010. Secara terperinci, batas (*threshold*) setiap tahun untuk daerah perkotaan dan perdesaan dapat dilihat pada Tabel dibawah. Jika peluang rumah tangga untuk jatuh miskin pada tahun mendatang melebihi *threshold*, maka rumah tangga tersebut dikategorikan rentan miskin.

Tabel Batas (*Threshold*) Kerentanan Kemiskinan Menurut Daerah, 2008-2010

Daerah	Tahun		
	2008	2009	2010
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	0,095	0,09	0,082
Perdesaan	0,164	0,147	0,135

IV. Temuan dan Analisis

Upaya pemberantasan kemiskinan suatu wilayah secara umum dapat dilihat dari perkembangan tingkat kemiskinan penduduk. Meskipun angka kemiskinan merupakan suatu pendekatan makro terhadap kesejahteraan penduduk, tetapi angka kemiskinan merupakan indikator yang paling tepat untuk menganalisis keberadaan penduduk termiskin dalam wilayah tersebut. Sepanjang tahun 1999 hingga tahun 2010, tingkat kemiskinan penduduk Pulau Jawa terus mengalami penurunan yang dramatis. Pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin Pulau Jawa mencapai 28,2 juta jiwa atau sekitar 23,4 persen dari keseluruhan penduduk. Selanjutnya dari tahun ke tahun, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga mencapai hampir setengahnya pada tahun 2010 yaitu 12,9 persen atau 17,3 juta penduduk memiliki pengeluaran di bawah garis kemiskinan.

Apabila ditinjau secara lebih mendalam, dari keseluruhan rumah tangga miskin yang ada di Pulau Jawa, sebagian besar merupakan rumah tangga yang tinggal di perdesaan. Pada tahun 2008, sebesar 64,7 persen rumah tangga miskin di Pulau Jawa tinggal di daerah perdesaan dan pada tahun 2010 proporsinya telah turun menjadi 56,2 persen. Sementara itu, karakteristik rumah tangga miskin yang tinggal di perdesaan adalah memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di sektor primer, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Sepanjang tahun 2008 hingga 2010, lebih dari 60 persen rumah tangga miskin di perdesaan memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di sektor primer. Sebagaimana dipaparkan Todaro (2004) bahwa penduduk miskin di negara berkembang sebagian besar

tinggal di perdesaan dan masih menggantungkan hidupnya dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai petani kecil atau buruh tani berpenghasilan rendah.

Tingkat kemiskinan rumah tangga pada suatu tahun menunjukkan banyaknya rumah tangga yang mengalami kekurangan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun, analisis mengenai kemiskinan tidak berhenti hanya pada tingkat kemiskinan. Dari tahun ke tahun, dengan tingkat kemiskinannya masing-masing, terjadi pergeseran status kemiskinan rumah tangga. Terdapat rumah tangga yang masuk dalam kemiskinan, keluar dari kemiskinan, maupun tetap berada dalam kemiskinan. Kondisi ini menunjukkan adanya suatu dinamika dalam kemiskinan. Terjadi pergerakan dalam kemiskinan, yaitu rumah tangga yang saat ini miskin dapat berubah menjadi tidak miskin pada tahun berikutnya, demikian juga sebaliknya.

Pada kurun waktu Maret 2008 hingga Maret 2009, sebesar 52,63 persen rumah tangga miskin daerah perkotaan berhasil keluar dari kemiskinan. Artinya, terdapat 47,37 persen rumah tangga miskin yang belum bisa keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, terdapat rumah tangga yang menjadi miskin pada tahun 2009. Sebanyak 19,63 persen rumah tangga hampir miskin, 11,7 persen rumah tangga hampir tidak miskin, dan 1,79 persen rumah tangga tidak miskin, jatuh ke dalam kemiskinan. Sementara itu untuk daerah perdesaan, sebesar 57 persen rumah tangga miskin berhasil keluar dari kemiskinan. Dengan kata lain, terdapat 43 persen penduduk miskin masih terjebak dalam kemiskinannya. Pada sudut pandang yang lain, terdapat rumah tangga yang awalnya tidak miskin, justru jatuh ke dalam kemiskinan. Sebanyak 20,4 persen rumah tangga hampir miskin, 12,4 persen rumah tangga hampir tidak miskin, serta 4,81 persen rumah tangga tidak miskin pada tahun 2008, menjadi miskin pada tahun 2009.

Pada kurun waktu berikutnya, yaitu Maret 2009 ke Maret 2010 terjadi pola pergeseran status kemiskinan yang hampir sama dengan periode sebelumnya, baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Sebanyak 55,5 persen rumah tangga miskin daerah perkotaan berhasil keluar dari kemiskinan. Artinya, terdapat 44,5 persen rumah tangga miskin yang belum bisa keluar dari kemiskinan. Di sisi lain, terdapat rumah tangga yang menjadi miskin pada tahun 2010. Sebanyak 20,3 persen rumah tangga hampir miskin, 8,9 persen rumah tangga hampir tidak miskin, dan 1,5 persen rumah tangga tidak miskin, jatuh ke dalam kemiskinan.

Sementara itu, pada daerah perdesaan sebesar 55,8 persen rumah tangga miskin keluar dari kemiskinan, sedangkan 44,2 persen rumah tangga belum bisa keluar dari kemiskinan. Di

sisi lain, 20,2 persen rumah tangga hampir miskin, 10,3 persen rumah tangga hampir tidak miskin serta 3,8 persen rumah tangga tidak miskin bergeser menjadi miskin pada tahun 2010.

Dinamika kemiskinan yang terjadi pada daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan pergerakan dalam kemiskinan, tetapi tidak mengubah tingkat kemiskinan dalam kedua daerah itu. Pergerakan tersebut menggambarkan sifat dan karakteristik kemiskinan di Pulau Jawa. Besarnya persentase rumah tangga yang tidak dapat keluar dari kemiskinan (lebih dari 40 persen) selama dua periode pada daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa banyak rumah tangga yang tidak berdaya dengan kemiskinannya. Bagaimanapun kondisi perekonomian pada dua periode tersebut, tidak mengubah kondisi rumah tangga miskin.

Selain rumah tangga yang tidak dapat keluar dari kemiskinan, karakteristik kemiskinan di Pulau Jawa juga ditunjukkan oleh besarnya persentase rumah tangga yang awalnya tidak termasuk miskin, kemudian masuk dalam kemiskinan. Dinamika kemiskinan yang terjadi di Pulau Jawa menunjukkan adanya volatilitas dalam pendapatan rumah tangga yang dalam hal ini juga tercermin pada pengeluaran rumah tangga. Volatilitas pengeluaran rumah tangga inilah yang membuat rumah tangga dapat mengalami perubahan status kemiskinan. Selain itu, volatilitas pengeluaran rumah tangga menunjukkan tingkat kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan. Dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas pengeluaran rumah tangga, nantinya dapat digunakan untuk mengukur kerentanan kemiskinan rumah tangga. Faktor-faktor yang memengaruhi volatilitas pengeluaran konsumsi rumah tangga di perkotaan dan perdesaan dapat diketahui melalui model pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Model Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan model regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect*, model pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga perkotaan yang terbentuk adalah:

$$\begin{aligned} \ln \widehat{\text{Kons}}_{it} = & 12,6876 - 0,0006 \text{ umur}_{it} + 0,3214 \text{ dik1}_{it} - 0,098 \text{ ukuran}_{it} + \\ & 0,2304 \text{ prop_kerja} + 0,0238 \text{ kredit1}_{it} + 0,1905 \text{ lantai1}_{it} + \\ & 0,0015 \text{ luas}_{it} + 0,1484 \text{ listrik}_{it} + 0,0514 \text{ air1}_{it} + \\ & 0,1112 \text{ kerja2}_{it} - 0,157 \text{ inflasi2}_{it} - 0,0768 \text{ geo1}_{it} + \\ & 0,2585 \text{ info1}_{it} - 0,0059 \text{ jarak}_{it} \end{aligned}$$

Sementara pada daerah perdesaan, diperoleh model pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga sebagai berikut.



$$\begin{aligned} \ln\widehat{Kons}_{it} = & 12,628 - 0,0014 \text{ umur}_{it} + 0,2435 \text{ dik1}_{it} - 0,0977 \text{ ukuran}_{it} + \\ & 0,0838 \text{ prop_kerja} + 0,1149 \text{ kredit1}_{it} + 0,1911 \text{ lantai1}_{it} + \\ & 0,0011 \text{ luas}_{it} + 0,2091 \text{ listrik}_{it} + 0,0079 \text{ air1}_{it} + \\ & 0,0423 \text{ kerja2}_{it} - 0,1513 \text{ inflasi2}_{it} + 0,0195 \text{ geo1}_{it} - \\ & 0,0912 \text{ lalin1}_{it} - 0,1014 \text{ lalin2}_{it} + \\ & 0,0199 \text{ info1}_{it} - 0,0007 \text{ jarak}_{it} \end{aligned}$$

Selanjutnya mengenai pengujian statistik, dilakukan Uji *Wald Chi square* yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga secara bersama-sama (*overall*) di dalam model regresi. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan STATA 11 untuk daerah perkotaan, diperoleh nilai statistik *Chi square* dengan derajat bebas 14 adalah 12.703,26 dan *p-value* 0,0000. *p-value* yang jauh lebih kecil dari 0,05 tersebut menunjukkan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang memengaruhi pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga. Sementara untuk daerah perdesaan, diperoleh nilai statistik *Chi square* dengan derajat bebas 16 adalah 9.162,33 dan *p-value* 0,000. Sama halnya dengan model perkotaan, *p-value* yang jauh lebih kecil dari 0,05 tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang memengaruhi pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga.

Selain pengujian secara *overall*, terdapat pula pengujian secara parsial dengan menggunakan statistik uji z (normal). Variabel signifikan memengaruhi pengeluaran per kapita rumah tangga ketika variabel lain dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan. Secara parsial, keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam model perkotaan signifikan memengaruhi pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga (pada tingkat signifikansi 1 persen). Sedangkan pada model perdesaan, dari 15 variabel yang digunakan, 12 variabel signifikan memengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tingkat signifikansi 1 persen. Variabel sumber air minum dan letak geografis wilayah tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen tetapi signifikan dalam tingkat signifikansi 10 persen. Sementara itu, variabel lalu lintas ke dan dari wilayah untuk kategori 1 (darat) signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen, sedangkan kategori 2 (air) tidak signifikan bahkan pada tingkat signifikansi 10 persen.

Pengaruh Faktor Demografi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Hasil pendugaan parameter menunjukkan bahwa aspek demografi, dalam hal ini umur KRT, memiliki koefisien regresi negatif baik pada model perkotaan maupun perdesaan.



Semakin meningkat umur KRT, pengeluaran per kapita rumah tangga semakin kecil. Kondisi demikian mengindikasikan keterkaitan aspek umur dengan produktivitas KRT.

Ukuran rumah tangga dalam analisis kemiskinan berkaitan dengan besarnya tanggungan yang dimiliki suatu rumah tangga. Berdasarkan nilai koefisien regresi, jika ART bertambah satu orang dan variabel lain tetap, maka pengeluaran per kapita rumah tangga baik di perkotaan maupun di perdesaan turun. Semakin besar jumlah ART, di mana setiap ART memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, makin besar pula tanggungan yang dimiliki rumah tangga.

Pengaruh Faktor Pendidikan terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Ditinjau dari aspek pendidikan, suatu rumah tangga yang memiliki KRT dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik. Tingkat pendidikan dan pengetahuan berperan dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh KRT untuk rumah tangganya. Kesejahteraan yang lebih baik tersebut tercermin dari nilai koefisien regresi pada model perkotaan dan perdesaan. Apabila suatu rumah tangga di perkotaan memiliki KRT dengan pendidikan SMP ke atas serta variabel lain konstan, maka pengeluaran per kapita rumah tangganya relatif lebih tinggi dari rumah tangga yang memiliki KRT berpendidikan di bawah SMP. Pada rumah tangga di daerah perdesaan, apabila KRT berpendidikan tertinggi SMP ke atas dan variabel lain tidak berubah, maka pengeluaran per kapita rumah tangganya relatif lebih tinggi dari rumah tangga yang memiliki KRT berpendidikan lebih rendah.

Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Kekuatan suatu rumah tangga dari sisi ekonomi dapat ditunjukkan melalui jumlah ART yang bekerja relatif terhadap jumlah ART. ART yang bekerja ini dapat mengusahakan atau melakukan strategi perbaikan perekonomian rumah tangga apabila rumah tangga mengalami *shock-shock* yang merugikan. Dengan demikian, semakin besar proporsi ART yang bekerja dalam suatu rumah tangga, perekonomian rumah tangga relatif lebih kuat. Pada rumah tangga perkotaan, jika jumlah ART yang bekerja bertambah satu orang, relatif terhadap jumlah ART serta variabel lain konstan, maka pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga cenderung naik. Sementara pada rumah tangga perdesaan, tingkat kenaikan pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga lebih rendah.

Pengaruh Faktor Kepemilikan Aset (Perumahan) terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Selain aspek demografi serta aspek yang menunjukkan kekuatan perekonomian rumah tangga, aspek perumahan juga turut berperan dalam menentukan besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Jika dilihat dari jenis lantai terluas yang dimiliki rumah tangga, maka rumah tangga di perkotaan maupun perdesaan yang rumahnya berlantai bukan tanah (bisa berupa keramik, ubin, dan sebagainya), mempunyai pengeluaran per kapita rumah tangga 19 persen lebih tinggi dari rumah tangga yang rumahnya berlantai tanah. Setelah jenis lantainya, luas lantai juga signifikan berpengaruh terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada rumah tangga perkotaan, jika luas lantai bertambah 1 m², pengeluaran per kapita rumah tangga relatif meningkat. Sementara pada rumah tangga perdesaan, apabila luas lantai bertambah 1 m², pengeluaran per kapita rumah tangga juga relatif meningkat.

Selain jenis dan luas lantai, sumber penerangan dan sumber air minum turut memengaruhi pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga. Suatu rumah tangga di perkotaan yang menggunakan listrik, memiliki pengeluaran per kapita relatif lebih tinggi dari rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik seperti petromak, sentir, dan sebagainya. Lain halnya dengan di perdesaan, rumah tangga yang menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, memiliki pengeluaran per kapita relatif lebih tinggi dari rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik. Sementara untuk sumber air minum yang dikonsumsi rumah tangga, konsumsi air bersih menunjukkan kesejahteraan yang lebih tinggi. Rumah tangga di daerah perkotaan yang memiliki sumber air minum bersih, mempunyai pengeluaran per kapita relatif lebih tinggi dari rumah tangga dengan sumber air minum tidak bersih. Untuk daerah perdesaan, air minum yang bersih juga mengindikasikan pengeluaran per kapita yang lebih tinggi (koefisien regresi positif) walaupun pengaruhnya tidak tampak nyata dalam taraf nyata 5 persen.

Pengaruh Karakteristik Wilayah terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Karakteristik wilayah yang pertama adalah letak geografis. Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga terbentuk dua wilayah yaitu wilayah pesisir yang langsung berbatasan dengan laut, serta wilayah bukan pesisir. Secara umum, wilayah pesisir merupakan pintu gerbang perdagangan yang menghubungkan penduduk suatu pulau dengan pulau lain, sehingga semestinya aktivitas ekonomi dapat lebih tumbuh di wilayah pesisir. Namun, berdasarkan hasil penelitian ini, rumah tangga yang tinggal di wilayah pesisir perkotaan, memiliki pengeluaran per kapita relatif lebih rendah dari rumah tangga yang



tinggal di wilayah bukan pesisir. Sementara pada daerah perdesaan, rumah tangga yang tinggal di wilayah pesisir memiliki pengeluaran per kapita yang lebih tinggi walaupun pengaruhnya tidak tampak nyata (pada tingkat signifikansi 5 persen).

Selanjutnya, aksesibilitas merupakan aspek penting dalam kaitannya dengan aktivitas ekonomi rumah tangga serta hubungan dengan daerah lain. Akses transportasi dan jarak dengan pusat kota (ibukota) dapat memengaruhi distribusi barang dan jasa dari dan keluar wilayah. Baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, semakin jauh jarak mengakibatkan rendahnya tingkat kesejahteraan rumah tangga. Apabila jarak wilayah tempat tinggal rumah tangga perkotaan dengan ibukota kabupaten/kota meningkat 1 km, maka pengeluaran per kapita rumah tangga relatif turun, begitu pula pada rumah tangga perdesaan.

Pengaruh *Shock* yang dialami Rumah Tangga terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Semua kemampuan rumah tangga serta daya dukung wilayah yang telah dipaparkan, merupakan aspek yang penting dalam mendukung respon rumah tangga terhadap adanya *shock* perekonomian. Salah satu *shock* yang sangat memengaruhi perekonomian rumah tangga adalah *shock* inflasi. Inflasi menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum sehingga mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Inflasi yang tinggi berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Rumah tangga yang mengalami *shock* inflasi di perkotaan maupun perdesaan, memiliki pengeluaran per kapita relatif lebih rendah dari rumah tangga yang tidak mengalami *shock* inflasi.

Di sisi lain, penulis menyadari bahwa masih ada aspek-aspek lain yang juga penting dalam memengaruhi pengeluaran konsumsi rumah tangga. Namun, banyak dari aspek-aspek tersebut belum memiliki standar pengukuran yang baku, seperti *shock* bencana alam, kebakaran, banjir, dan sebagainya yang secara nyata merupakan suatu *shock* bagi perekonomian rumah tangga. Selain itu, keterbatasan data juga menjadi kendala tersendiri bagi penelitian ini, seperti data mengenai aset yang dimiliki rumah tangga.

Kerentanan Kemiskinan di Pulau Jawa

Setelah diperoleh faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga, maka nilai harapan pengeluaran per kapita rumah tangga atau prospek pengeluaran per kapita pada tahun depan serta simpangan bakunya dapat diestimasi. Kemudian, dengan menggunakan data garis kemiskinan tahun 2009, 2010, dan estimasi garis kemiskinan tahun 2011 serta hasil estimasi nilai harapan dan standar deviasi, dihasilkan peluang setiap rumah tangga untuk jatuh miskin di tahun 2009, 2010, dan 2011.

Peluang yang dimiliki setiap rumah tangga per tahunnya selanjutnya dibandingkan dengan batas (*threshold*) yang telah ditetapkan untuk menentukan rentan tidaknya suatu rumah tangga terhadap kemiskinan. Batas (*threshold*) yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat kemiskinan rumah tangga dalam populasi pada waktu yang sama (fraksi kemiskinan).

Berdasarkan batas yang telah ditetapkan, diperkirakan sebanyak 1.344.754 atau sekitar 8,2 persen rumah tangga di daerah perkotaan rentan miskin pada tahun 2008. Rentan miskin pada tahun 2008 memiliki arti rumah tangga tersebut menghadapi risiko kemiskinan lebih besar dari rata-rata risiko yang dihadapi keseluruhan rumah tangga. Dengan demikian, rumah tangga yang rentan miskin pada tahun 2008 memiliki peluang besar untuk jatuh miskin pada tahun 2009. Tingkat kerentanan kemiskinan rumah tangga ini meningkat menjadi 10,9 persen pada tahun 2009, lalu pada tahun 2010 mengalami sedikit penurunan menjadi 10,4 persen.

Sementara itu, pada daerah perdesaan, jumlah rumah tangga yang diperkirakan memiliki peluang tinggi jatuh miskin di tahun 2009 (rentan miskin di tahun 2008) adalah 5.279.606 atau sekitar 30,4 persen dari keseluruhan rumah tangga. Tingkat kerentanan kemiskinan ini kemudian meningkat menjadi 46,1 persen pada tahun 2009, lalu sedikit turun pada tahun 2010 menjadi 44 persen.

Berdasarkan hasil estimasi, tampak bahwa pergerakan tingkat kerentanan kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan membentuk pola yang sama, yaitu meningkat cukup tinggi pada tahun 2009, lalu sedikit menurun pada tahun 2010. Kondisi ini dipicu oleh tingginya inflasi Pulau Jawa pada tahun 2008 yang mencapai 9,26 persen yang menjadi *shock* bagi rumah tangga sehingga memperbesar jumlah rumah tangga yang memiliki peluang tinggi untuk jatuh miskin pada tahun 2009. Dengan demikian, *shock* inflasi dapat meningkatkan tingkat kerentanan kemiskinan rumah tangga di Pulau Jawa.

Selanjutnya, keterkaitan antara status kemiskinan rumah tangga dengan kerentanan kemiskinan juga dapat diidentifikasi. Dari keseluruhan rumah tangga miskin di perkotaan tahun 2008, sebanyak 27,8 persennya merupakan rumah tangga yang memiliki peluang tinggi untuk jatuh miskin pada tahun 2009 (berstatus rentan miskin pada tahun 2008). Sementara dari keseluruhan rumah tangga tidak miskin, 6,1 persennya rentan terhadap kemiskinan tahun 2009. Pada tahun 2009, sebanyak 31,4 persen rumah tangga miskin di perkotaan merupakan rumah tangga rentan miskin. Sedangkan apabila ditinjau dari rumah tangga tidak miskin pada tahun 2009, sebesar 8,9 persennya merupakan rumah tangga rentan miskin. Begitu pula pada tahun 2010, hubungan antara status kemiskinan rumah tangga dengan kerentanan kemiskinan



menunjukkan pola yang sama, yaitu apabila suatu rumah tangga berstatus miskin, maka kecenderungannya menjadi rentan miskin lebih besar dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Hal ini diperlihatkan oleh nilai *Odds Ratio* sebesar 4,78 yang mengandung arti rumah tangga miskin di perkotaan pada tahun 2010 memiliki kecenderungan untuk menjadi rentan miskin 4,78 kali rumah tangga tidak miskin. Dengan demikian, pada daerah perkotaan, rumah tangga yang miskin lebih rentan terhadap kemiskinan daripada rumah tangga yang tidak miskin.

Di sisi lain, pada tahun 2008 sebesar 56,2 persen rumah tangga miskin perdesaan merupakan rumah tangga rentan miskin. Nilai *odds ratio* yang dimiliki sebesar 3,79 yang memiliki makna rumah tangga miskin di perdesaan memiliki kecenderungan untuk menjadi rentan miskin 3,79 kali rumah tangga tidak miskin. Kemudian berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010, persentase rumah tangga miskin yang rentan terhadap kemiskinan adalah 73,4 persen dan 66,1 persen. Kondisi ini menunjukkan kecenderungan yang sama dengan daerah perkotaan, yaitu rumah tangga miskin lebih rentan terhadap kemiskinan.

Setelah analisis mengenai kerentanan kemiskinan dilakukan, penting untuk mengetahui gambaran ketepatan ukuran kerentanan yang telah dibangun. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan membandingkan antara prediksi tingkat kemiskinan dan tingkat kemiskinan yang telah diukur (Chaudhuri, 2002). Rumah tangga yang rentan miskin adalah rumah tangga yang memiliki peluang tinggi untuk jatuh miskin pada waktu mendatang. Dengan demikian, rumah tangga yang rentan miskin merupakan rumah tangga yang diperkirakan menjadi miskin pada tahun mendatang. Berdasarkan tinjauan tersebut, maka penilaian ketepatan pengukuran kerentanan kemiskinan dalam penelitian ini dilakukan dengan mentabulasi silangkan antara kerentanan kemiskinan pada tahun “t” dengan status kemiskinannya pada tahun “t+1”. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat data yang digunakan merupakan data panel di mana rumah tangga yang sama diikuti serta diambil informasinya selama beberapa periode.

Periode penelitian mencakup tiga tahun yaitu 2008, 2009, dan 2010 sehingga dapat dilakukan dua validasi silang (*cross validation*), yaitu antara kerentanan kemiskinan tahun 2008 dengan status kemiskinan tahun 2009 serta kerentanan kemiskinan tahun 2009 dengan status kemiskinan tahun 2010. Sementara kerentanan kemiskinan tahun 2010 tidak dapat dilakukan validasi silang karena pada tahun 2011, Susenas Panel mengalami pergantian sampel rumah tangga.

Berdasarkan hasil validasi silang, ketepatan pengukuran kerentanan kemiskinan rumah tangga perkotaan pada tahun 2008 adalah 88,02 persen. Artinya, dari keseluruhan



sampel rumah tangga yang digunakan dalam penelitian ini, 88,02 persen di antaranya diprediksi secara “tepat” oleh ukuran kerentanan kemiskinan yang dibangun. “Tepat” yang dimaksud di sini adalah ketika rumah tangga diprediksi rentan miskin pada tahun 2008, maka rumah tangga tersebut benar-benar jatuh miskin pada tahun 2009. Begitu juga sebaliknya, rumah tangga yang diprediksi tidak rentan miskin pada tahun 2008, maka rumah tangga tersebut benar-benar berstatus tidak miskin pada tahun 2009. Selanjutnya, ketepatan pengukuran kerentanan kemiskinan rumah tangga perkotaan tahun 2009 juga cukup baik, yaitu 86,88 persen.

Pada daerah perdesaan, ketepatan pengukuran kerentanan kemiskinan rumah tangga pada tahun baru mencapai 69,82 persen. Sedang ketepatan pengukuran kerentanan kemiskinan tahun berikutnya, yaitu tahun 2009 hanya mencapai 59,39 persen.

Profil Kemiskinan Anak pada Rumah Tangga Rentan Miskin di Pulau Jawa

Menurut BPS (2008), ketersediaan profil kemiskinan sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk atau rumah tangga miskin. Begitu pula dengan profil kemiskinan anak pada rumah tangga rentan miskin. Pemahaman mengenai karakteristik sosial, demografi, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan anak pada rumah tangga rentan miskin diharapkan mampu membantu perencanaan, pengawasan, dan evaluasi dari program pencegahan kemiskinan yang efektif dan efisien.

Hasil penelitian memperlihatkan rata-rata jumlah anak pada rumah tangga rentan miskin di daerah perkotaan dan perdesaan. Berdasarkan informasi mengenai jumlah anak, terlihat bahwa rata-rata jumlah anak pada rumah tangga rentan miskin di perkotaan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 berturut-turut adalah 2,09; 1,98; dan 1,92. Sementara itu, rumah tangga rentan miskin di perdesaan memiliki rata-rata jumlah anak berturut-turut sebanyak 1,91; 1,75; dan 1,75. Angka ini mengandung makna rumah tangga rentan miskin di perkotaan dan perdesaan pada umumnya memiliki hingga satu hingga tiga anak.

Berdasarkan studi tentang kerentanan kemiskinan sebelumnya, rumah tangga rentan miskin cenderung mempunyai anggota rumah tangga yang lebih banyak (Kumala, 2011). Hal ini mengindikasikan tingginya tingkat kelahiran pada rumah tangga rentan miskin. Menurut BPS (2008), jumlah anggota rumah tangga yang besar dapat menghambat peningkatan sumber daya manusia masa depan (anak-anak).

Ditinjau dari segi pendidikan, menurut BPS (2008), orang yang berpendidikan lebih baik akan mempunyai peluang yang lebih rendah menjadi miskin. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan yang baik akan memperkecil kerentanan seseorang terhadap

kemiskinan. Anak-anak yang merupakan aset besar kemajuan bangsa mutlak membutuhkan pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal melalui jalur sekolah maupun nonformal. Namun, berbanding terbalik dengan harapan, sepanjang tahun 2008 hingga 2010 terdapat anak yang putus sekolah dalam rumah tangga rentan miskin. Di daerah perkotaan, terdapat 7,5 persen rumah tangga rentan miskin yang memiliki anak putus sekolah pada tahun 2008 dan berangsur-angsur turun menjadi 6 persen pada tahun 2010. Pola yang sama juga ditunjukkan oleh rumah tangga rentan miskin di perdesaan yaitu 7,8 persen pada tahun 2008, turun menjadi 6,5 persen pada tahun 2010. Keberadaan rumah tangga dengan kasus anak putus sekolah memang relatif menurun, namun demikian kondisi ini tidak dapat diabaikan karena ketika anak-anak tidak lagi bersekolah, terhentilah salah satu jalur utama pendidikan anak.

Kekuatan perekonomian suatu rumah tangga dapat dinilai melalui seberapa banyak anggota rumah tangga yang bekerja relatif terhadap jumlah anggota rumah tangga. Hal penting yang ingin ditangkap adalah seberapa besar kekuatan anggota rumah tangga yang bekerja untuk menanggung kehidupan dirinya sendiri serta anggota rumah tangga lain yang tidak bekerja. Sementara itu, dalam perspektif yang sedikit berbeda, posisi anak dalam suatu keluarga adalah sebagai buah hati yang harus dilindungi, dipahami dan dipenuhi kebutuhannya baik secara moral, kasih sayang maupun material. Dengan demikian, terkait dengan aspek ekonomi, anak-anak seharusnya masuk pada golongan anggota rumah tangga yang tidak bekerja. Tidak sepatutnya anak-anak dibebani tanggung jawab untuk turut menopang perekonomian rumah tangga. Namun, berdasarkan hasil penelitian, sepanjang tahun 2008 hingga 2010 terdapat 1 hingga 3 persen rumah tangga rentan miskin di perkotaan dan perdesaan memiliki minimal 1 pekerja anak dalam rumah tangganya.

Kesehatan merupakan aspek yang tak kalah pentingnya untuk dipenuhi sebagai hak dasar anak mulai dari mereka lahir hingga beralih ke usia dewasa. Pada rumah tangga rentan miskin di perkotaan yang diteliti, tahun 2008 hingga 2010 ditemukan rumah tangga yang kelahiran anaknya tidak dengan bantuan tenaga medis yakni berturut-turut sebanyak 14,88 persen, 12,57 persen, dan 9,72 persen. Sementara dipedesaan juga ditemui kasus yang sama dengan persentase yang lebih tinggi yaitu sebanyak 21,31 persen (2008), 16,86 persen (2009), dan 15,80 persen (2010). Tingginya presentase tersebut tentunya mempertegas bahwa rumah tangga rentan miskin pun belum mampu membiayai persalinan anaknya dengan bantuan medis. Setelah kelahiran, anak mengalami masa perkembangan yang penting untuk dijaga kesehatannya. Pada saat anak berusia bayi, mereka butuh adanya imunisasi yang dijadikan kekebalan tubuh terhadap serangan virus penyakit. Kasus imunisasi tak lengkap pada rumah



tangga rentan miskin juga penting untuk disoroti karena persentasenya yang sangat tinggi. Didaerah perkotaan, terdapat sebanyak 88,33 persen (2008), 86,53 persen (2009), 87,80 persen (2010) rumah tangga rentan miskin memiliki anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Sama halnya di perdesaan juga terdapat sebanyak 89,38 persen (2008), 88,25 persen (2009), 89,88 persen (2010) rumah tangga rentan miskin memiliki anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.

Fenomena kemiskinan ternyata tak hanya berdampak buruk pada fisik dan mental anak, tetapi juga mempengaruhi psikis dan perilaku anak. Kemiskinan membuat rumah tangga tak mampu memenuhi kebutuhan pangan anak dengan baik. Sehingga tak jarang orang tua memilih untuk menikahkan anaknya pada usia yang sangat dini dengan harapan mereka dapat berkeluarga dan mandiri memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentu hal tersebut cara berfikir yang keliru. Pada umumnya pemikiran tersebut hanya akan menghasilkan rumah tangga-rumah tangga miskin yang baru. Hasil penelitian menyebutkan bahwa di daerah perdesaan terdapat 0,34 persen (2008), 0,28 persen (2009), dan 0,40 (2010) rumah tangga rentan miskin memiliki anak yang menikah di usia kurang dari 15 tahun. Di daerah perkotaan pun ditemui kasus demikian, terdapat 0,24 persen (2008), 0,27 persen (2009), dan 0,421 (2010) rumah tangga rentan miskin memiliki anak yang menikah di usia kurang dari 15 tahun. Walaupun persentasenya cukup kecil, tetapi tentu hal tersebut bukan hal yang wajar. Pernikahan terlalu dini juga mempunyai banyak dampak buruk seperti rapuhnya terhadap perceraian, persalinan yang membahayakan untuk usia ibu yang terlalu muda, dan lain-lain.

V. Rekomendasi Kebijakan

Hingga saat ini, berbagai program telah digalakkan dan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Program-program itu diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA). Keempat program tersebut tujuannya mengarah pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan pemenuhan hak dasar anak dalam hal pendidikan. Namun, sayangnya program-program tersebut belum dapat berjalan sesuai dengan yang semestinya. Berbagai masalah timbul seperti penyelewengan, salah sasaran, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaannya. Walaupun belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang optimal, keberadaan program tersebut masih sangat diharapkan oleh masyarakat untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia, setidaknya dapat mengurangi kemiskinan meski belum sampai tuntas.



Upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan bertahun-tahun namun belum mampu menuntaskan masalah kemiskinan. Hal itu menunjukkan betapa peliknya masalah kemiskinan tersebut. Ironisnya, dampak negatif kemiskinan bahkan sampai menjangkau anak-anak yang merupakan aset berharga bangsa ini. Kemiskinan benar-benar merupakan masalah multidimensi yang memerlukan kebijakan dan program intervensi multidimensi. Pengentasan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi beban kemiskinan ada di pundak kita semua. Semua harus mengambil peran baik masyarakat maupun pemerintah.

Dari sisi pemerintah, evaluasi program-program pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan. Kekurangan pada sistem sebelumnya harus terus disempurnakan guna mengoptimalkan hasil dari program tersebut. Selain itu, dalam upaya mengentaskan dan memutuskan mata rantai kemiskinan, pemerintah perlu memberi perhatian yang serius pada anak-anak. Hak-hak mereka harus terpenuhi dan terjamin. Alokasi anggaran untuk kepentingan publik juga seharusnya lebih berpihak pada pembangunan generasi penerus dan diarahkan untuk memenuhi hak-hak anak dalam rangka mengembangkan potensi diri serta memberikan bekal kemampuan untuk masa depan mereka. Penghematan anggaran juga sepatutnya dilakukan oleh para wakil rakyat jika memang mereka benar-benar serius dan tulus mewakili rakyat dan menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, termasuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, mengingat masih begitu banyak dan akan lebih banyak lagi barisan anak-anak yang harus ditolong akibat semakin kerasnya deraan kehidupan ekonomi yang semakin memprihatinkan akhir-akhir ini. Selain program-program yang telah ada, pemerintah juga perlu memperbanyak program yang sifatnya dapat memberdayakan masyarakat. Artinya tidak membuat masyarakat bergantung terus menerus dari pemerintah. Program yang memandirikan masyarakat seperti perluasan lapangan pekerjaan, mempermudah kredit usaha, harus terus digiatkan. Dengan demikian, perlahan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi lain, tentunya masyarakat pun tak boleh menutup mata, telinga, dan hati terhadap apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Tentu masih teringat kasus seseorang yang meninggal karena kelaparan. Bahkan tetangganya pun tak tahu hal tersebut, sungguh sangat memprihatinkan. Masyarakat seharusnya dapat lebih peka melihat fenomena kemiskinan ini. Tidak hanya terus mengkritisi kebijakan yang ditetapkan pemerintah tetapi juga turut serta dalam program pengentasan kemiskinan. Salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat yaitu merekomendasikan rumah tangga yang benar-benar miskin sebagai penerima bantuan dari pemerintah, bukan atas dasar kekeluargaan ataupun ada kepentingan lainnya. Berkaitan dengan kemiskinan anak, masyarakat yang berada pada golongan ekonomi



atas dapat menjadi orang tua asuh bagi anak-anak yang berada pada rumah tangga miskin. Tentu hal tersebut sangat membantu dalam hal pemenuhan hak-hak anak-anak utamanya pendidikan dan kesehatannya.

Saling mendukung antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam pengentasan kemiskinan. Tentunya hal yang tak boleh dilupakan bahwa rumah tangga rentan miskin merupakan rumah tangga yang berpeluang lebih besar untuk jatuh miskin pada periode selanjutnya. Sehingga memberi perhatian khusus terhadap rumah tangga rentan miskin sama halnya melakukan pencegahan terjadinya kemiskinan pada waktu yang mendatang. Secara otomatis, hal tersebut juga berdampak positif pada anak dimana hak-hak dasarnya seperti pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Anak-anak adalah calon pemimpin negara di masa depan, maka sudah sepatutnya mereka diajaga dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Windhiarso Ponco. (2011). Menghitung Ongkos Ekonomi Dampak Pencabutan Subsidi BBM. *Presentasi*. Jakarta: Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Badan Pusat Statistik.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2010). Buku RPJMN 2010-2014, Buku 1: Prioritas Nasional. 6 Mei 2011. <http://bappenas.go.id/get-file-server/node/8939/>
- Badan Pusat Statistik. (2000). *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2001). *Statistik Indonesia 2001*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2002). *Statistik Indonesia 2002*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2004). *Statistik Indonesia 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2004). *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2004*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2006). *Statistik Indonesia 2005/2006*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2007). *Analisis dan Tingkat Kemiskinan 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2007). *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2007). *Statistik Indonesia 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2008). *Analisis Perkembangan Statistik Ketenagakerjaan (Laporan Sosial Indonesia 2007)*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2008). *Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2008). *Statistik Perumahan dan Permukiman 2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2008). *Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Barat 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2008). *Statistik Indonesia 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2009). *Statistik Indonesia 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2009). *Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2010). *Statistik Indonesia 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2010). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2009*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. (2011). Analisis Kemiskinan di Indonesia. *Presentasi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Baltagi, Badi H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data (3rd ed)*. England: John Wiley & Sons.
- Brandeis University. R-Squared Notes. 9 September 2011. <http://people.brandeis.edu/~nika/schoolwork/Statistics%20Notes/r%252Dsquared.pdf>



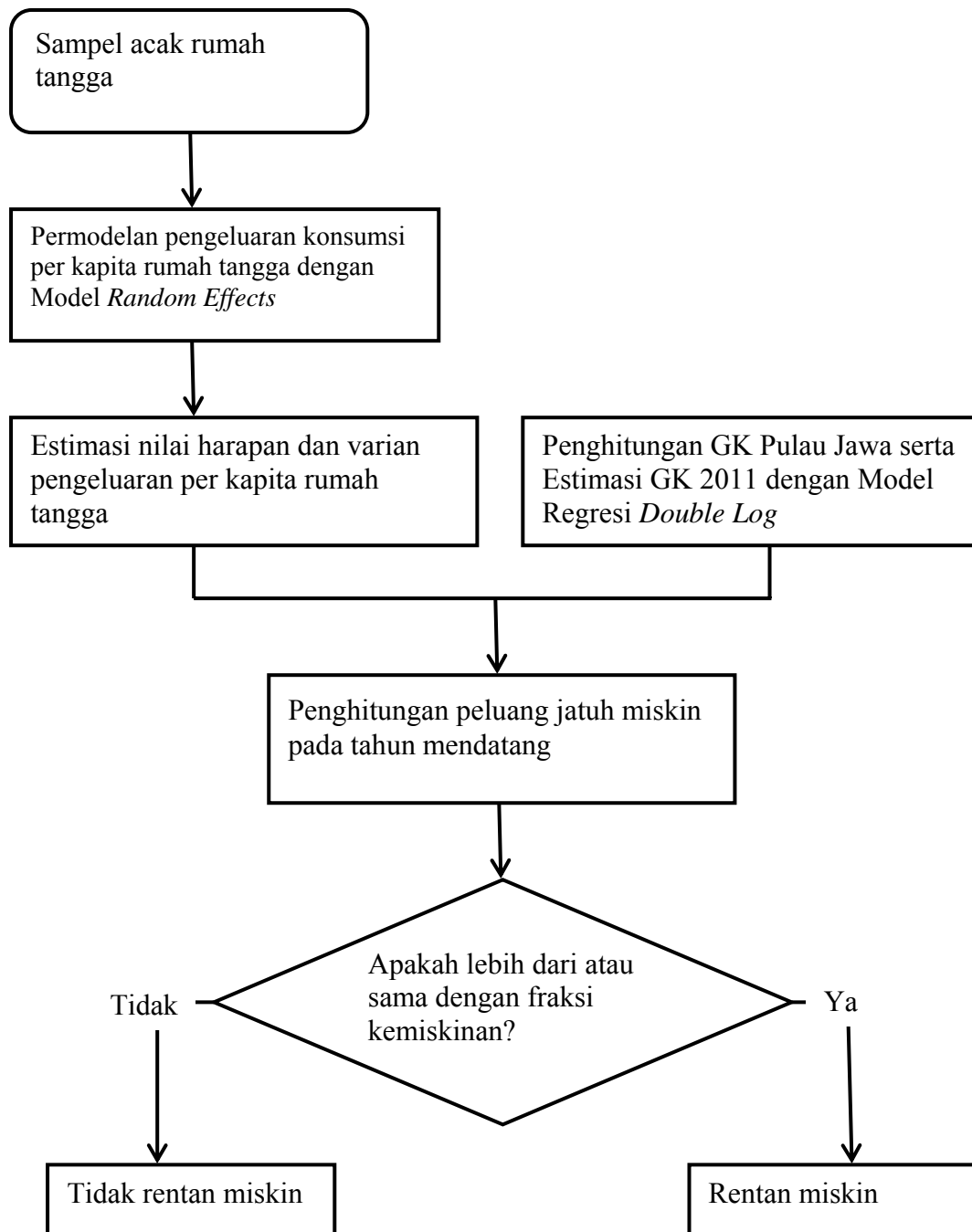
- Chaudhuri, S., Jalan, J., dan Suryahadi, A. (2002). Assessing Household Vulnerability to Poverty from Cross-sectional Data: A Methodology and Estimates from Indonesia. *Discussion Paper*. Department of Economics, Columbia University, New York.
- Chaudhuri, Shubham. (2003). Assessing Vulnerability to Poverty: Concepts, Empirical Methods and Illustrative Examples. Department of Economics Columbia University.
- Christiaensen, Luc J dan Boisvert, Richard N. (2000). On Measuring Household Food Vulnerability: Case Evidence from Northern Mali. *Working Paper*. Department of Applied Economics and Management Cornell University, Ithaca, New York.
- Dercon, Stefan. (2002). *Vulnerability and Poverty. Presentation*. Oxford University.
- Duke University. What's a good value for R-squared? 9 September 2011. <http://www.duke.edu/~rnau/rsquared.htm>
- Echevin, Damien. (2009). Poverty and Vulnerability in Haiti. Universite de Sherbrooke.
- Glewwe, Paul dan Hall, Gillette. (1998). Are Some Groups More Vulnerable to Macroeconomic Shocks than Others? Hypothesis Test Based on Panel Data from Peru. *Journal of Development Economics*, Vol. 56, 181-206.
- Gould, William. (2009). Relationship between The Chi Squared and F Distribution. *Stata Corp*.
- Greene, W.H. (2002). *Econometric Analysis (5th ed)*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics (4th ed)*. McGraw Hill.
- Judge, George G.; Griffiths, William E.; Hill, R. Carter; Lee, Tsoung-Chao. (1979). *The Theory and Practice Econometrics (5nd ed)*. USA: John Wiley & Sons.
- Kamanou, Gisele dan Morduch, Jonathan. (2002). Measuring Vulnerability to Poverty. *Discussion Paper*. World Institute for Development Economic Research, United Nation University.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2008). *Pedoman Umum PEMP 2008*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- _____. (2009). *Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat PLBPM 2009*. Jakarta: Direktorat Tata Ruang Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kumala, Armelia Zukma. 2011. *Dinamika Kemiskinan dan Pengukuran Kerentanan Kemiskinan di Pulau Jawa (2008-2010)*. [skripsi]. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2008). Masyarakat Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 19 Januari 2011. <http://books.google.com>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Menteri Keuangan. (2008). Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Sasaran Inflasi Tahun 2008, 2009, dan 2010. Diakses tanggal 13 April 2011.

- Milcher, Susanne. (2009). *Household Vulnerability Estimates of Roma in Southeast Europe*. Cambridge Political Economy Society, Oxford University Press.
- Neter, J., Wasserman, W., dan Kutner, M.H. (1989). *Applied Linear Regression Models (2nd ed)*. Boston: Irwin.
- Oduro, Abena D. (2002). *Poverty Dynamics. Advanced Poverty Training Programme*. SISERA dan WBI.
- Pondokinfo. (2009). Sektor Informal: Permasalahan dan Upaya Mengatasinya. 30 Juli 2011. <http://www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/64-sektor-informal-permasalahan-dan-upaya-mengatasinya.html>
- Ragawino, Bewa. (2005). Sistem Peraturan Perundang Undangan Negara Indonesia. *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjadjaran*. 5 Mei 2011. http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/sistem_peraturan_perundang_undangan_negara_republik_indonesia.pdf
- [Ravallion, Martin. \(1988\). Expected Poverty Under Risk-Induced Welfare Variability. *The Economic Journal*, Vol. 98, 1171-1182.](#)
- [Rubio, Gloria M. dan Soloaga, Isidro. \(2004\). Assessing the Vulnerability of Agricultural Households to Macroeconomic Shock: Evidence from Mexico. *Electronic Journal of Agricultural and Development Economics*, FAO, Vol. 1, No.1, pp 45-62.](#)
- [Singarimbun, M., Effendi, S. \(1987\). *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES.](#)
- Suhariyanto, Kecuk. (2009). *Metode Penghitungan Kemiskinan. Presentasi*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sunarjo, Gunawan, Pribadi. (2010). *Gempabumi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Meteorologi dan Geofisika.
- Supranto, J. (2000). *Statistik, Teori dan Aplikasi (Edisi Keenam)*. Jakarta: Erlangga
- Tambunan, Tulus T.H. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Thorbecke, Erik. (2004). *Conceptual and Measurement Issues In Poverty Analysis. Discussion Paper No 2004/04*. World Institute for Development Economics Research. United Nation University.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Jilid 1, Edisi Kedelapan)*. Jakarta: Erlangga.
- UNDP dan BAPPENAS. (2008). *Millenium Development Goals*. 6 Mei 2011. <http://www.undp.or.id/pubs/docs/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs%20-%20ID.pdf>
- Walpole, Ronald. E. (1993). *Pengantar Statistika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wooldridge, Jeffrey M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. Massachusetts: The MIT Press.
- World Bank Institute dan Badan Pusat Statistik. (2002). *Dasar-dasar Analisis Kemiskinan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.



LAMPIRAN





Prosedur Pengukuran Kerentanan Kemiskinan

Tabel Pergeseran Status Kemiskinan Rumah Tangga dari Maret 2008 ke Maret 2009 Menurut Daerah (Persen)

Kondisi Maret 2008		Kondisi Maret 2009				
		Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	Miskin	47,37	22,18	14,82	15,63	100
	Hampir Miskin	19,63	24,92	21,79	33,66	100
	Hampir Tidak Miskin	11,70	19,78	21,97	46,55	100
	Tidak Miskin	1,79	3,62	5,95	88,64	100
Perdesaan	Miskin	43,0	25,7	14,4	16,9	100
	Hampir Miskin	20,4	25,7	22,7	31,2	100
	Hampir Tidak Miskin	12,4	21,82	21,44	44,34	100
	Tidak Miskin	4,81	9,74	13,25	72,2	100

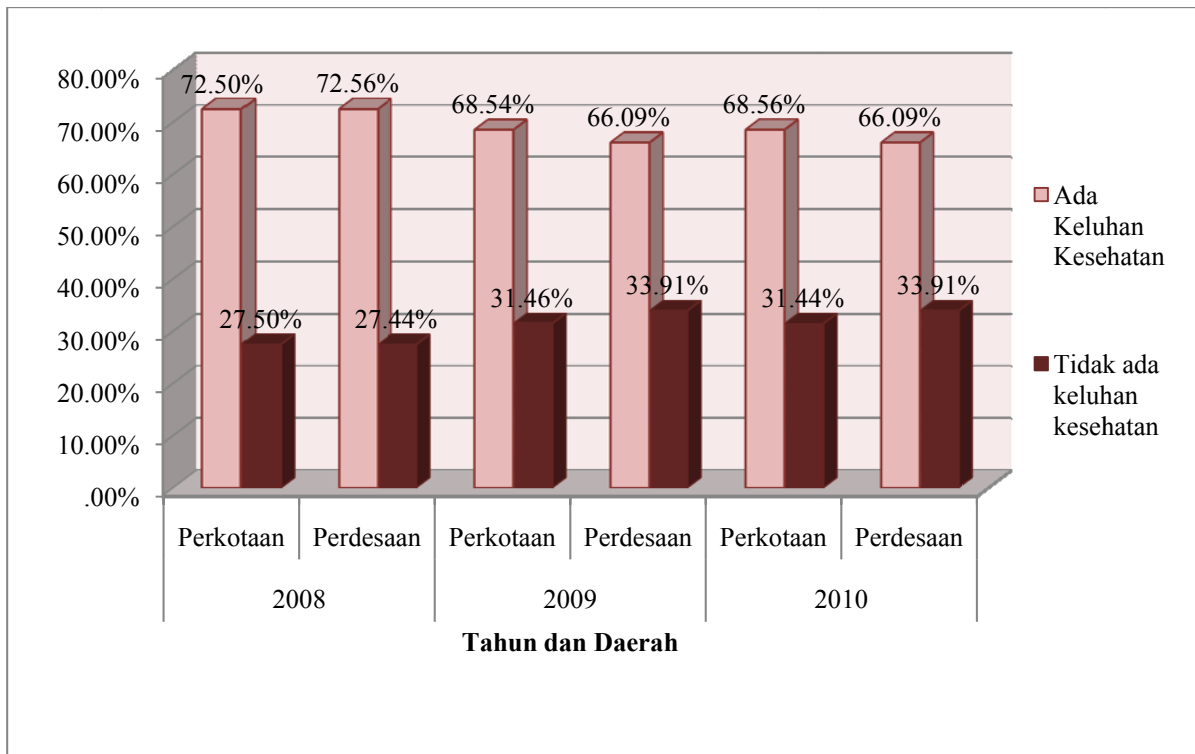
Tabel Pergeseran Status Kemiskinan Rumah Tangga dari Maret 2009 ke Maret 2010 Menurut Daerah (Persen)

Kondisi Maret 2009		Kondisi Maret 2010				
		Miskin	Hampir Miskin	Hampir Tidak Miskin	Tidak Miskin	Total
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	Miskin	44,5	24,7	13,1	17,7	100
	Hampir Miskin	20,3	27,2	20,1	32,4	100
	Hampir Tidak Miskin	8,9	17,5	22,2	51,4	100
	Tidak Miskin	1,5	3,0	5,3	90,3	100
Perdesaan	Miskin	44,2	23,84	11,32	20,64	100
	Hampir Miskin	20,2	28,2	17,7	33,9	100
	Hampir Tidak Miskin	10,3	20,7	20,8	48,2	100
	Tidak Miskin	3,8	8,6	10	77,6	100

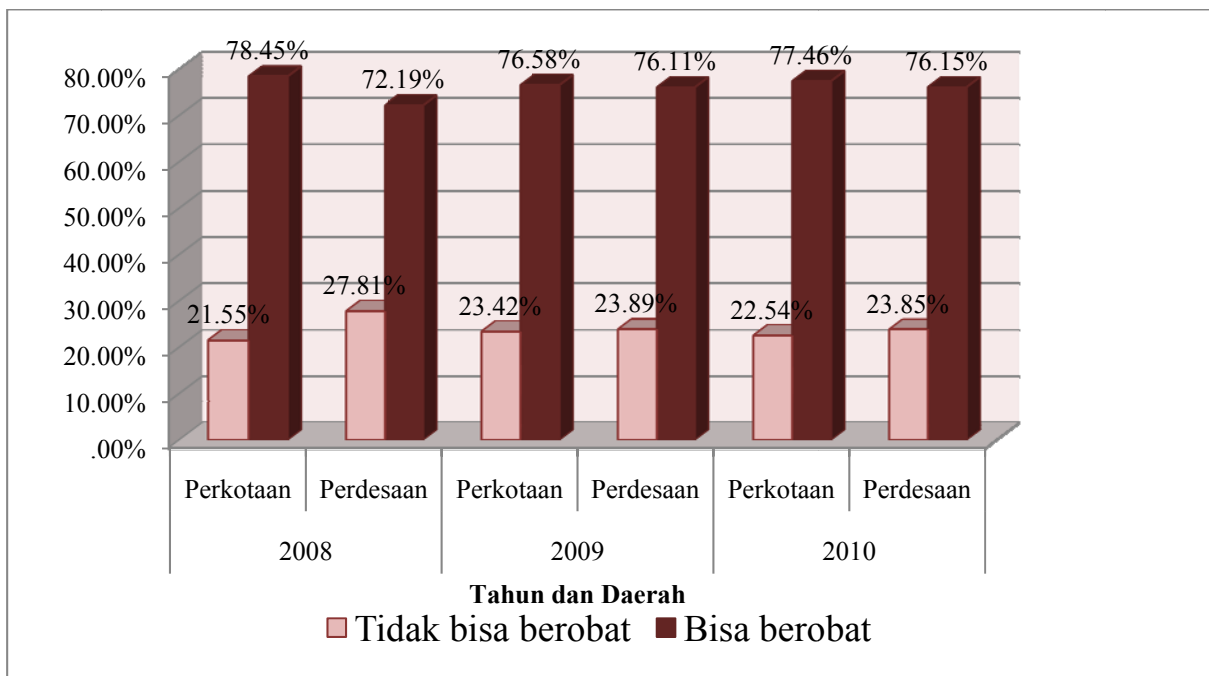
Tabel . Pendugaan Parameter Model Pengeluaran Konsumsi per Kapita Rumah Tangga Perkotaan dan Perdesaan

No	Variabel Bebas	Model Perkotaan		Model Perdesaan	
		Koefisien Regresi	<i>p-value</i>	Koefisien Regresi	<i>p-value</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Umur KRT	-0,0006	0,008	-0,0014	0,000
2.	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan KRT 2 (SMP ke atas)	0,3214	0,000	0,2435	0,000
3.	Ukuran rumah tangga	-0,0980	0,000	-0,0977	0,000
4.	Proporsi ART yang bekerja	0,2304	0,000	0,0838	0,000
5.	Penerimaan kredit usaha 1 (menerima)	0,0238	0,005	0,1149	0,000
6.	Jenis lantai terluas 1 (bukan tanah)	0,1905	0,000	0,1911	0,000
7.	Luas lantai	0,0015	0,000	0,0011	0,000
8.	Sumber penerangan 1 (listrik)	0,1484	0,000	0,2091	0,000
9.	Sumber air minum 1 (air bersih)	0,0514	0,000	0,0079	0,067
10.	Status pekerjaan KRT 2 (tidak bekerja)	0,1112	0,000	0,0423	0,000
11.	<i>Shock</i> inflasi 2 (terjadi <i>shock</i>)	-0,1570	0,000	-0,1513	0,000
12.	Letak geografis wilayah 1 (pesisir)	-0,0768	0,000	0,0195	0,080
13.	Lalu lintas dari dan ke wilayah 1 (darat) 2 (air)			-0,0912 -0,1014	0,022 0,169
14.	Akses terhadap informasi 1 (baik)	0,2585	0,000	0,0199	0,001
15.	Jarak dengan ibukota kabupaten/kota	-0,0059	0,000	-0,007	0,000
<i>Adjusted R²</i>		0,3423		0,2302	

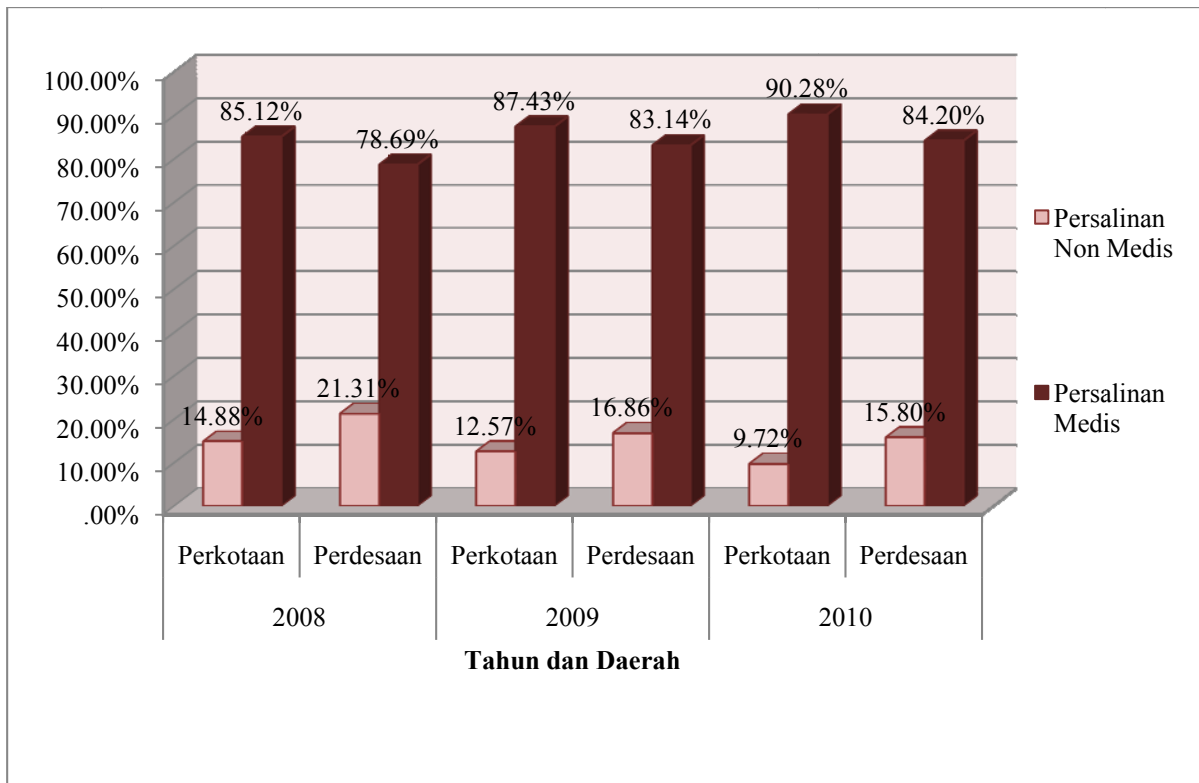
Sumber: diolah dari Susenas Panel 2008, 2009, 2010, BPS



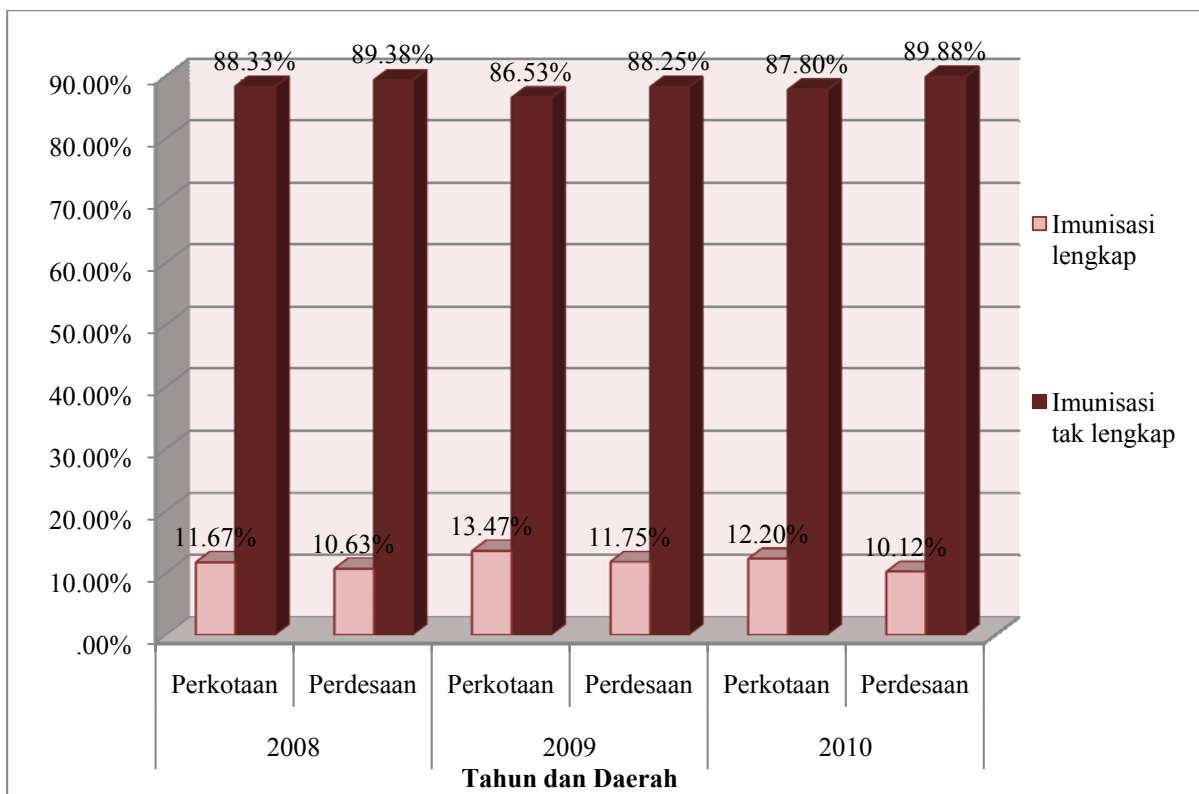
Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Anak yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Daerah Tahun 2008-2010



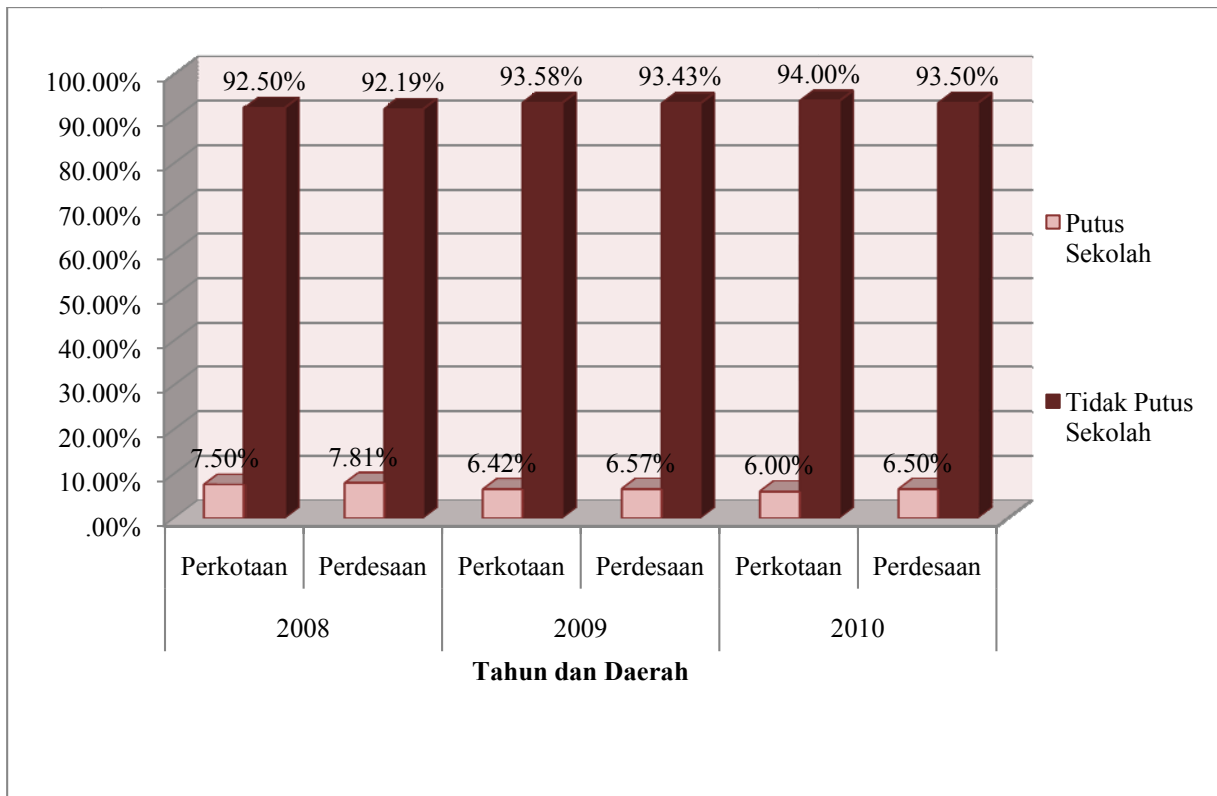
Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Anak yang Sakit dan Tidak Bisa Berobat Jalan Serta Daerah Tahun 2008-2010



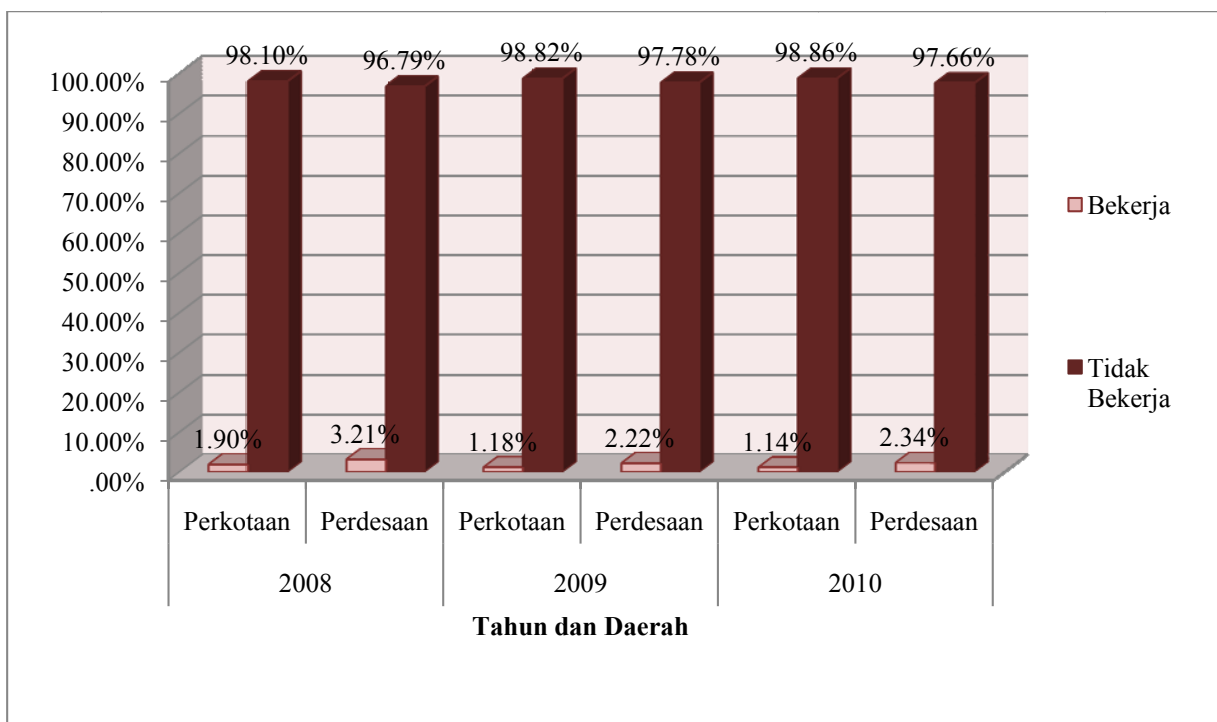
Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Anak yang Dilahirkan Tanpa Bantuan Tenaga Medis dan Daerah Tahun 2008-2010



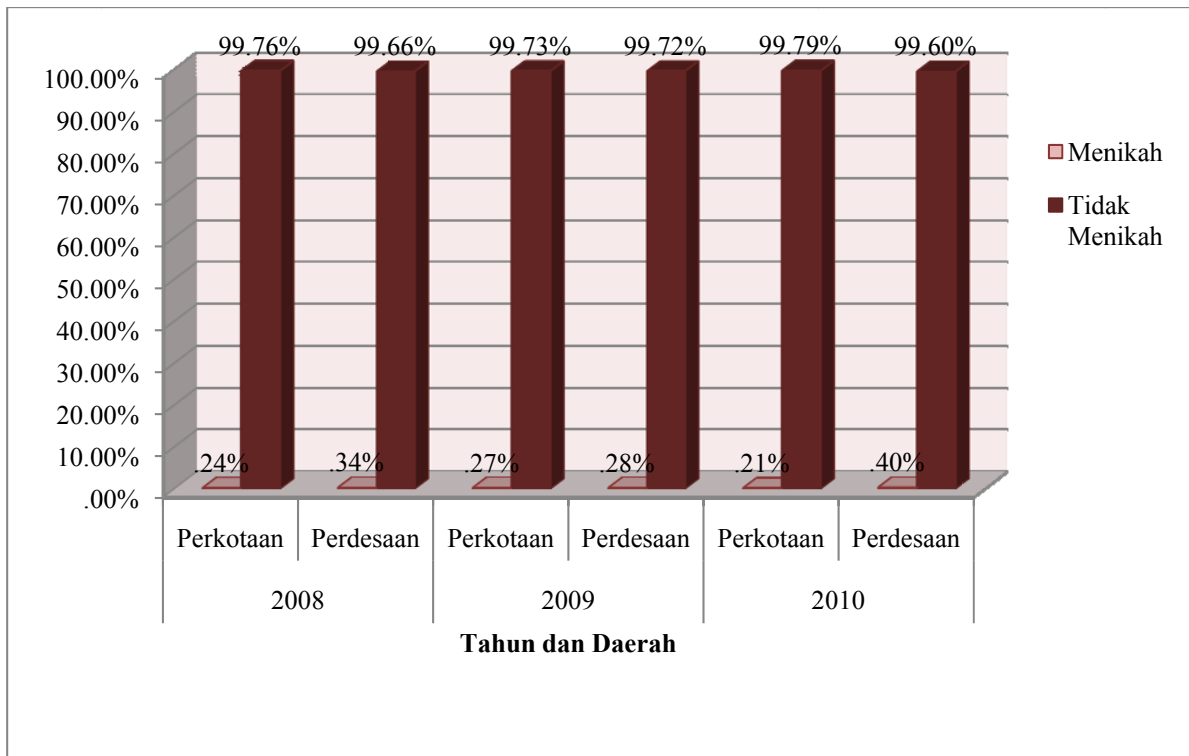
Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Anak yang Tidak Menerima Imunisasi Lengkap dan Daerah Tahun 2008-2010



Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Anak Putus Sekolah dan Wilayah Tahun 2008-2010



Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Pekerja Anak dan Daerah Tahun 2008-2010



Gambar . Persentase Rumah Tangga Rentan Miskin Menurut Keberadaan Kasus Pernikahan Anak dan Daerah Tahun 2008-2010